

**DILEMA PLURALITAS
DAN PERANAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

*Abdul Wahid¹***Abstrak :**

Kehidupan umat manusia sedari awal telah diciptakan secara beragam oleh Tuhan. Keberagaman di satu sisi merupakan anugrah namun di sisi lain menimbulkan problem dalam kehidupan sosial. Alih-alih menjadi kohesi sosial, pluralitas justru kerap kali melahirkan eksklusifisme yang mengantarkan pada sikap anarkis. Pendidikan agama yang bercorak fiqih oriented yang kental dengan nuansa apologetik dianggap menjadi akar fundamental yang cenderung menggiring peserta didik untuk menafikan keberadaan pihak lain di luar keberadaannya, idealnya pendidikan agama merupakan mercusuar yang dapat memberikan pencerahan sehingga masyarakat memiliki kearifan dalam melihat pluralitas sebagai sebuah keniscayaan, dengan demikian pendidikan agama dapat berperan sebagai kohesi sosial dalam kerangka pluralitas.

Kata Kunci : Pluralitas – Konflik – Pendidikan Agama

Kehidupan umat manusia selalu dalam keadaan pluralistik, beragam, baik secara alami (jenis kelamin, ras, dan etnis) maupun secara budaya (bahasa, struktur sosial, nilai-nilai yang dianut, dan tradisi keagamaan). Pluralitas hidup ini tidak saja terjadi pada masyarakat modern, tetapi juga dapat ditemukan pada masyarakat sejak tahapan sejarah paling dini atau zaman prasejarah.

Bagi bangsa Indonesia, pluralitas kehidupan itu merupakan kesinambungan dari tradisi megalitik masa prasejarah. Keragaman ini, menurut sementara antropolog, tergambar dalam tiga aspek kehidupan, yakni teknologi, organisasi sosial, dan religi. Dalam hal teknologi, tradisi megalitik telah menghasilkan alat batu yang beragam bentuknya. Dalam

¹ Penulis adalah Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

aspek sosial, antara lain ditandai dengan adanya pembagian kerja, kemudian munculnya kelompok-kelompok fungsional dan hubungan sosial yang bersifat struktural, vertikal, dan horisontal. Begitu juga dalam religi, muncul keragaman pola ritual yang bertumpu pada kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Unsur religilah yang merupakan aspek paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat masa itu.

Dalam kehidupan tradisional, orang-orang yang berlatarbelakang berbeda, baik suku, ras, maupun agama, masing-masing, hidup dalam suatu komunitas sendiri-sendiri. Komunitas itu homogen. Artinya, setiap komunitas terdiri dari hanya satu agama, satu ras, dan satu tradisi. Sedangkan dalam kehidupan modern dengan modernisasi dan teknologinya yang melahirkan globalisasi, orang tidak lagi bisa hidup dalam suatu komunitas tunggal, melainkan heterogen. Dalam masyarakat modern, suatu komunitas terdiri dari konfigurasi berbagai macam budaya dan latar belakang manusia. Konfigurasi itu membentuk suatu corak kehidupan pluralistik dengan berbagai problem yang menyertainya. Sedemikian rupa kehidupan modern itu sehingga hampir tak ada wilayah yang bebas dari kehidupan yang pluralistik.

Dewasa ini, suasana kehidupan yang pluralistik bukan hanya sebagai realita yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai problematika. Hal ini menjadi isu penting seiring dengan menguatnya tuntutan-tuntutan dari komunitas masyarakat atau entitas budaya, terutama yang minoritas dan pinggiran, untuk eksis dan diakui keberadaannya dalam kerangka hegemoni universalisme dan keragaman.

Pluralitas memiliki dua sisi yang sama-sama hadir. Secara fungsional, di satu sisi, ia merupakan 'rahmat' atau khasanah sosial budaya yang memiliki peran-peran tertentu yang dianggap positif bagi masyarakat. Dengan beragamnya hidup, manusia dapat berbagi satu sama lain. Mereka juga dapat memupuk nilai-nilai dan peradaban bersama untuk mencapai sebuah idealitas hidup. Sekalipun didalamnya ada kemungkinan terjadi bentrokan, namun bentrokan itu diupayakan tidak sampai merusak tatanan dan karenanya masyarakat yang hidup didalamnya mesti dibekali dengan modal kesetiaan, solidaritas dan toleransi.

Tetapi disisi lain, pluralitas merupakan tantangan dan problem yang pada saat-saat tertentu menghantui masyarakat. Disana-sini pluralitas sering menjadi "prakondisi", kalau bukan sumber bagi instabilitas, konflik, disintegrasi sosial, kekerasan, bahkan pembunuhan

massal semacam *genocide* (pembasmian etnis). Meskipun demikian, dalam perspektif penganut teori konflik, keadaan musykil yang menyertai pluralitas itu tidak lain adalah juga proses sosial yang kalau terpaksa harus ditempuh manusia untuk pencapaian-pencapaian tertentu dalam kehidupannya. Dalam kerangka teori konflik, senegatif-negatifnya konflik tentu memiliki nilai positif bagi –katakanlah- proyek revolusi sosial.

Kesadaran akan pluralitas masyarakat tidak serta merta membuat masyarakat arif menyikapinya. Antara lain karena, *Pertama*, orang tidak mengetahui persis apa sisi positif – negatif dari fenomena ini sehingga tidak bisa menentukan kapan dimanfaatkan dan untuk apa, serta kapan dihindari dan bagaimana. *Kedua*, dibalik fenomena ini bercokol faktor eksternal berupa kepentingan suatu pihak untuk memanfaatkan kondisi masyarakat bagi capaian-capaian tertentu. Politik, sebagai suatu proses pemanfaatan kondisi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kepentingan, adalah faktor yang paling dominan menyertai munculnya berbagai eksese negatif dari pluralitas masyarakat.

Pluralisme Agama. Di antara aspek pluralitas yang tinggi potensialitas peran positif-negatifnya adalah pluralitas keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan agama yang memiliki fungsi *multi-faces*. Agama bisa berperan sebagai faktor kohesi sosial dimana manusia pemeluknya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan –individu dan masyarakat-didalamnya. Tetapi disaat lain agama bisa juga menjadi faktor konflik dan disintegrasi. Dengan agama orang bisa meledakkan suatu revolusi sosial yang berwatak kekerasan dan intoleran. Dengan agama pula suatu masyarakat bisa bangkit menafikan, melawan, dan membasmi kelompok masyarakat lainnya. Orang yang memiliki warna kulit, bahasa, dan budaya yang sama bisa saling membantai karena perbedaan agama, seperti yang berlangsung di Balkan. Sebaliknya, orang Sudan di Afrika bisa bergandengan mesra dengan orang Indonesia yang memiliki warna kulit, bahasa dan budaya yang berbeda sama sekali dengan mereka, hanya karena faktor kesamaan agama. Senada dengan itu, Oles Riis² mengatakan, pluralisme di satu sisi bisa membawa kepada perdamaian dan hidup berdampingan atau bahkan pertemuan ideologi (*ideological convergen*), tetapi disisi lain bisa membawa keretakan sosial jikalau terjadi intensitas kesadaran akan perbedaan mendasar antara pandangan dunia

² Ole Rais, *Modes of Religious Pluralism under Conditions of Globalisation*. Diambil 20 Agustus 2003 dari <http://www.Unesco.org/must/v1Iris.htm>.

(*word view*) masing-masing pihak yang akhirnya bisa memicu konflik agama yang berkepanjangan.

Di Indonesia, sebuah negeri pluralistik yang oleh banyak orang dianggap sebagai model kerukunan hidup antarumat beragama, juga sarat dengan tarik menarik antara dua sisi fungsional agama ini. Agama dalam konteks ke-Indonesiaan diakui sebagai modal dasar pembangunan, seperti tertuang dalam GBHN. Agama di samping sebagai aspek yang dibangun juga sebagai faktor pembangun, terutama karena agama dianggap memiliki nilai-nilai yang bisa membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Tetapi juga banyak contoh di mana eksistensi agama-agama menimbulkan konflik dalam masyarakat, baik secara horisontal maupun secara vertikal. Secara horisontal, peristiwa yang terjadi di beberapa daerah seperti di Ambon, Kupang, Mataram, Poso, penghancuran sarana ibadah di beberapa tempat, dan kerusuhan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang muncul selama ini adalah bukti konkret bagi 'apa-apa'-nya pluralitas keagamaan itu, ketika ia disikapi tidak pada tempatnya atau dipolitisir. Secara vertikal, muncul kemelut yang berkepanjangan antar umat yang beragama tertentu dengan pemerintah karena pemerintah dianggap menguntungkan komunitas agama tertentu dan merugikan komunitas agama lain.

Kekerasan atas nama agama dan krisis hubungan antarpemeluk agama bisa muncul, paling tidak, karena faktor internal agama itu sendiri dan faktor eksternal yang menyusup kedalamnya. Secara internal, setiap agama pasti memiliki klaim kebenaran (*truth claim*), yang tidak bisa ditiadakan, karena dia merupakan "energi hidup" bagi agama. Tanpa klaim kebenaran, agama tidak memiliki daya tarik dan pengikat bagi pemeluknya. Ini berkaitan dengan peran sentral agama sebagai pemberi kepastian dan pegangan hidup. Dalam hal ini, klaim kebenaran bersifat positif.

Yang menjadi masalah, klaim kebenaran ini cenderung dipahami secara dangkal berupa penegasian pihak lain yang memiliki klaim berbeda. Kecenderungan seperti ini, senantiasa melekat dan menyertai sejarah hubungan antarpemeluk agama, seperti yang berlangsung pada kontak awal antar komunitas Yahudi dengan Nasrani pada saat munculnya

agama Nabi Isa ini. Serta antar komunitas Yahudi-Nasrani dengan komunitas Islam saat kelahiran agama yang dibawa Muhammad ini.³

Diantara faktor eksternal dari hubungan antaragama adalah kondisi sosio-kultural yang meliputi politik, ekonomi, dan sosial-budaya dimana agama itu hidup. Aspek-aspek ini berkait-kelindan dengan sisi-dalam agama dalam membentuk wajah agama, sedemikian rupa sehingga seringkali batas antara keduanya menjadi tidak bisa dibedakan. Ini ditambah lagi dengan kepentingan pemeluk agama yang menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Intervensi aspek-aspek ini menjadikan klaim kebenaran yang positif tadi menjadi berbanding terbalik sebagai salah satu sumber konflik dan disintegrasi sosial. Dus, pluralitas agama yang tadinya merupakan peluang, berubah menjadi tantangan bagi kehidupan bersama.

Eksklusivisme keagamaan bisa mengkrystal sedemikian rupa akibat proses evolusi sosio-kultural yang panjang. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti masuknya aspek-aspek historis, institusionalisasi agama, penggunaan emosi keagamaan untuk kepentingan tertentu, serta pendidikan dan sosialisasi.

PERANAN PENDIDIKAN. Manusia mempunyai potensi keagamaan yang dibawa sejak lahir. Dalam Islam, hal ini disebut fitrah (QS. 30:30). Meski demikian, tidak serta merta setiap orang yang dilahirkan langsung menjadi agamis. Diperlukan campur tangan pihak lain (faktor sosiologis) untuk mengaktualisasikan potensi keberagaman yang dimiliki itu.⁴ Keterlibatan pihak lain tersebut terwujud dalam bentuk pengajaran, bimbingan dan perhatian dalam rangka menanamkan ajaran agama. Survei yang dilakukan Spilka dkk.⁵ membuktikan bahwa selain keluarga, teman sebaya dan lingkungan, pendidikan disekolah memiliki peranan yang cukup signifikan dalam membentuk citra keagamaan di kalangan anak-anak.

Faktor pendidikan dan pengajaran dalam pembentukan sikap keagamaan dan respons terhadap realitas keragaman, jelas sangat penting. Karena sebagai proses sosial pendidikan dan pengajaran merupakan wahana bagi suatu agama untuk mentransmisikan ajaran-

³ Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*, (j.a. "Pluralism, Challenge to World Religions," a.b. Bosco Carvallo). Yogyakarta: Karnisius, 1989.

⁴ Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion: An Introduction to Religious Experience and Behavior*. (New York: The Macmillan Company, 1978), 85.

⁵ Bernard Spilka, Ralf W. Hood, Richard L. Gorsuch, *The Psychology of Religion: An Empirical Approach* (New Jersey: Prentice Hall, 1985), 85.

ajarannya. Dengan konsep dasar sebagai proses alih nilai (*transfer of values*) dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), pendidikan berperan menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan agama kepada pemeluknya.⁶ Nilai-nilai dan pengetahuan keagamaan ini, kemudian berpadu membentuk sikap dan perilaku keagamaan. Dengan demikian, kalau dalam proses pendidikan, agama diajarkan sebagai sesuatu yang eksklusif, maka *output*-nya adalah manusia yang bersikap eksklusif. Sebaliknya kalau agama diajarkan sebagai sesuatu yang terbuka dan dengan cara yang demokratis, maka hasilnya adalah manusia-manusia yang terbuka dan bisa memahami keberadaan orang lain dengan keunikan-keunikan pribadi dan latar belakangnya.

Dengan demikian, wajar jika terjadi kekacauan dalam masyarakat, kekeliruan paradigma dan pelaksanaan pendidikan sehingga menjadi sekedar pengajaran, merupakan hal yang dianggap sebagai penyebabnya sehingga digugat. Dalam konteks kemasyarakatan hubungan sesama pemeluk agama, tentulah pendidikan agama menjadi sorotan. Dalam keadaan seperti ini pendidikan agama menghadapi problem sekaligus tantangan yang besar, meskipun hal ini sebenarnya merupakan problem dan tantangan pendidikan nasional secara keseluruhan, karena pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional.

Ketika masyarakat Indonesia dewasa ini mengalami berbagai macam krisis, seperti krisis politik, ekonomi hukum dan kebudayaan, orang melihatnya sebagai refleksi krisis pendidikan nasional, karena pendidikan merupakan bagian dari keseluruhan hidup manusia didalam segala aspek sosial. Pendidikan nasional dilihat sebagai potret buram yang harus diperbaiki.⁷

Untuk memperbaiki pendidikan perlu dimulai dari menelaah kembali tataran paradigmanya. Paradigma lama pendidikan yang telah usang dan tidak relevan, perlu direvisi dan diganti dengan paradigma baru yang mampu menyahut realitas yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu paradigma yang dewasa ini mulai berkembang adalah paradigma pendidikan pascamodern. Paradigma ini merupakan derivasi dari pemikiran filsafat Derrida,

⁶ Hujair AH Sanaki. Muslih Usa, Moralitas pendidikan dalam Transformasi Sosial. *Pendidikan Islam*. Vol. 4. Th. III, Maret 1998.

⁷ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 42.

Foucault, Gramsci, dan para pemikir pascamodern lainnya.⁸ Dalam paradigma ini digambarkan suatu masyarakat yang menghargai kebhinekaan dan pluralisme.

Paradigma dan wacana pascamodern menjadi relevan untuk dikemukakan karena coraknya yang kritis terhadap segala proyek modernitas. Seperti diketahui gugatan terhadap dunia pendidikan seperti yang dilakukan oleh Everett Reimer, Ivan Illich, Paulo Freire, Henry Giroux, dan di Indonesia misalnya oleh Roem Topatimassang, Francis Wahono, dan sebagainya, pada dasarnya adalah bagian dari gugatan terhadap modernitas, karena pendidikan dewasa ini mau tidak mau adalah bagian yang tak terpisahkan dari proyek itu. Dalam proyek modernitas, tatanan, sentralitas, otoritas pusat, ketunggalan dan keseragaman, adalah hal yang dijunjung tinggi, sementara lokal, partikularitas, dan keunikan keragaman diabaikan atau dinafikan.

Kehadiran wacana pasca-modernisme dan pluralisme dalam melihat paradigma pendidikan menjadi sebuah hal yang menarik, karena dengan itu pendidikan diharapkan akan mampu memberikan cara pandang alternatif dan penuh nuansa terhadap kebenaran, sehingga interkomunikasi dan kerukunan masing-masing pemeluk kebenaran bisa dicapai. Untuk pencapaian ini, sebagaimana dikatakan Mukti Ali⁹, ilmu agama (baca: pendidikan agama) lebih banyak memainkan peranan dibanding ilmu-ilmu lain.

PERANAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Untuk melihat peran yang dimainkan oleh pendidikan agama, terutama Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam konfigurasi pluralitas, antara lain bisa dicermati bagaimana buku-buku teks pelajaran agama menjabarkan konsep-konsep yang terkait dengan fenomena pluralitas. Penelitian Wahid¹⁰ terhadap buku teks Pendidikan Agama Islam SMU terbitan Departemen Agama menunjukkan:

Pertama, Materi buku PAI SMU memiliki karakteristik-karakteristik yang menonjol, antara lain: (a). Orientasi yang kuat kepada perkembangan ranah kognitif. Dengan mengedepankan kompetensi kognitif, pendidikan agama menjadi kehilangan fungsi utamanya

⁸ Ibid.

⁹ Mukti Ali, Hubungan Antar Agama dan Masalah-masalahnya. Dalam Eka Darmaputra (Ed.). *Konteks Berteologi di Indonesia*. Yogyakarta: BPK, 1997.

¹⁰ Abdul Wahid, *Pluralisme Agama, Pascamodernisme, dan Pendidikan Agama di Indonesia (Telaah Buku Teks Pendidikan Agama Islam SMU)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak didik menuju manusia yang *berakhlakul karimah*. (b). Penekanan kepada aspek intelektual juga diarahkan kepada pemahaman agama yang bersifat fiqhiyah atau syari'ah. Orientasi ini dilihat dari dominasi wacana fiqh di dalamnya, sementara materi-materi yang berorientasi kepada pengembangan akhlak dan hubungan kemanusiaan tampak sedikit. (c). Ketimpangan semacam ini juga terlihat dari substansi materi akidah yang banyak menonjolkan corak teologi skolastik yang cenderung apologis dan tertutup. Hal ini juga didukung oleh penonjolan yang dominan ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa normatif dan apologetik yang mengukuhkan keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat agung "*ya'lu wa la yu'la alaih*" serta sangat akomodatif bahkan sebagai pendorong kemajuan peradaban umat manusia. (d). Dengan komposisi materi yang ada, tampaknya buku PAI SMU tidak memiliki sensibilitas yang kuat terhadap kecenderungan dan fenomena aktual yang dihadapi umat beragama dewasa ini, yaitu fenomena konflik yang terjadi antar umat beragama yang beragama di Indonesia. Dari materi yang ada hanya satu materi yang secara langsung berhubungan dengan persoalan kerukunan hidup antar umat yang beragama. Kemunculan materi itu lebih merupakan kewajiban yang diamanatkan Departemen Agama sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap masalah kerukunan umat beragama, bukan atas dasar sensibilitas.

Kedua, meskipun topik yang secara langsung berhubungan dengan persoalan hubungan antar agama dan wacana pluralisme tampak sedikit, secara tidak langsung, dalam buku PAI SMU, banyak ditemukan aspek-aspek penafsiran yang kental dengan diskursus itu, dan itu terselip dalam topik-topik mengenai definisi Islam, wawasan tentang nabi dan rasul, tentang kitab suci, juga tentang kiprah Islam dalam masyarakat. Dalam berbagai topik itu, tergambar adanya wawasan pluralisme yang termuat dalam buku PAI SMU, tetapi wawasan pluralisme yang dimaksud lebih berorientasi ke dalam. Dengan kata lain, pluralisme yang hendak diperkenalkan adalah pluralisme internal suatu agama. Dalam konteks ini, yang disebut sebagai realitas plural adalah keragaman bahasa, etnis, jenis kelamin, atau paling jauh keragaman mazhab anutan. Sementara itu, keanekaragaman agama belum sepenuhnya disadari sebagai realitas konkret dalam masyarakat. Di balik penekanan kepada wawasan pluralisme internal tersebut, tidak bisa dielakkan ikut sertanya klaim kebenaran mutlak yang dikandung oleh agama tertentu (dalam hal ini Islam). Misalnya kesadaran bahwa Islam adalah

agama yang paling akhir, paling absah, dan karenanya diturunkan sebagai anutan seluruh umat manusia. Karena itu, dalam konteks hubungan antar pemeluk agama, model wawasan semacam ini justru mengarah kepada eksklusivisme, yakni munculnya identifikasi diri dari pemeluk agama yang bersangkutan bahwa agama yang dipeluknya memang berbeda dengan agama lain dalam hal prinsip-prinsip keabsahan, otentisitas, dan kandungan nilai luhur ajarannya.

Jikalau terdapat nuansa inklusivisme dalam wawasan-wawasan tentang dimensi-dimensi agama, maka itu tidak lain adalah identifikasi dan pengakuan akan adanya persamaan-persamaan beberapa aspek agama seperti monoteisme yang dikandung oleh agama-agama besar seperti Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, dibalik wawasan inklusivisme tersebut terdapat kecenderungan kepada pemikiran universalisme, dan itu artinya kental dengan dominasi dan kooptasi satu agama terhadap agama lain. Hanya saja, dari beberapa kecenderungan tersebut, tidak tergambar pemikiran yang mencerminkan adanya permusuhan dan rasa curiga dari satu agama terhadap agama lain.

Ketiga, pengembangan wawasan keagamaan seperti yang termuat dalam buku PAI SMU pada taraf-taraf tertentu memiliki kaitan yang sangat erat dengan terbentuknya sikap-sikap keagamaan tertentu. Kecenderungan yang kuat kepada wawasan fiqh bisa melahirkan suatu pandangan keagamaan yang formalistik, yang melihat segala sesuatu secara hitam putih. Aspek-aspek material dan artifisial mejadi parameter untuk melihat, menilai dan mengidentifikasi seseorang. Demikian juga jikalau wawasan keagamaan mencerminkan eksklusivisme dan klaim kebenaran yang kental, akan menghadirkan cara pandang dan cara sikap beragama yang ingin menang sendiri, benar sendiri, dan mutlak-mutlakan. Jika kehidupan keagamaan didasari dengan cara pandang seperti itu, maka dalam berhubungan dengan orang lain atau pemeluk agama lain, yang lebih berpeluang untuk tampil adalah rasa curiga, apriori, dan ketidaksediaan untuk berdialog atau berinteraksi. Konflik hubungan manusia baik secara individual maupun secara komunal, baik yang bernuansa agama maupun konflik yang menjadikan kondisi agama sebagai pemicu, bisa tersemayam dalam keadaan seperti ini. Jika pun telah terjadi konflik, maka tidak akan mudah mencairkan kebekuan-kebekuan hubungan yang diselimuti klaim mutlak untuk mencari jalan rekonsiliasi atau jalan damai. Jika

demikian halnya, jelas sikap keagamaan semacam itu tidak kondusif bagi suasana kehidupan keagamaan yang plural seperti dewasa ini.

TAWARAN PEMIKIRAN. Jikalau negara, melalui Departemen Agama atau lembaga pendidikan agama, hendak mensponsori hubungan agama yang harmonis di tengah pluralisme agama di negeri ini, maka perlu ditemukan suatu paradigma atau konsep pendidikan agama baru yang lebih kondusif ke arah itu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut:

Pertama, pelajaran agama Islam yang menjadi wahana sosialisasi wawasan, ajaran dan nilai keagamaan hendaknya memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural. Dalam hal ini perlu pengajaran agama yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara berbagai realitas perbedaan. Atau jikalau para pembelajar bersifat homogen, maka paling tidak pelajaran agama bisa memberi wawasan pemahaman, pengenalan, atau perbandingan kepada agama lain.

Kedua, pengajaran aspek-aspek keagamaan hendaknya seimbang antara aspek kognisi, aspek afeksi, dan aspek psikomotor. Demikian juga halnya antara akidah dengan akhlak, atau fiqh dan sebagainya. Penekanan kepada aspek kognisi, doktrin-teologis dan fiqh saja, sebagaimana terbaca dalam bahan ajar pelajaran agama kita selama ini, menjadi kurang relevan dengan upaya pencarian perilaku agama yang humanis di tengah pluralitas.

Ketiga, konsep-konsep pluralisme agama yang krusial seperti klaim kebenaran, dialog, toleransi, rekonsiliasi, resolusi konflik, hendaknya mendapat perhatian khusus dengan menjadikannya sebagai topik atau *entry point* tersendiri dalam buku-buku pelajaran agama, tidak sekedar terintegrasi atau terselip begitu saja dalam topik-topik yang berbeda-beda.

Akhirnya, tidak ada lain yang harus mengambil peran terdepan dalam proyek besar ini selain PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Sebab corak hubungan suatu komunitas sungguh sangat tergantung kepada konfigurasi mayoritas-minoritas, dan Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat kita.¹¹

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti Ali, Hubungan Antar Agama dan Masalah-masalahnya. Dalam Eka Darmaputra (Ed.). *Konteks Berteologi di Indonesia*. Yogyakarta: BPK, 1997.
- Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion: An Introduction to Religious Experience and Behavior*. New York: The Macmillan Company, 1978.
- Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*, (j.a. "Pluralism, Challenge to World Religions," a.b. Bosco Carvallo). Yogyakarta: Karnisius, 1989.
- Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam Untuk Siswa SMU/SMK Kelas I,II,dan III*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.
- Ole Rais, Modes of Religious Pluralism under Conditions of Globalisation. Diambil 20 Agustus 2003 dari [http://www. Unesco.org/must/v1ris.htm](http://www.Unesco.org/must/v1ris.htm).
- Hujair AH Sanaki. Muslih Usa, Moralitas pendidikan dalam Transformasi Sosial. *Pendidikan Islam*. Vol. 4. Th. III, Maret 1998.
- Bernard Spilka. Ralf W. Hood. Richard L. Gorsuch, *The Psychology of Religion: An Empirical Approach*. New Jersey: Prentice Hall, 1985.
- Tamizi Taher, *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia*. Jakarta: Cencis, 1997.
- H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Abdul Wahid, *Pluralisme Agama, Pascamodernisme, dan Pendidikan Agama di Indonesia (Telaah Buku Teks Pendidikan Agama Islam SMU)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.